



SARANA KOMUNIKASI POLITIK UMAT KRISTIANI DI INDONESIA: STUDI PERAN PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS) PERIODE 2004-2009

Yandi Hermawandi
Universitas Garut, Fakultas Ilmu Komunikasi
email: yandihermawandi@uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan partai-partai politik umat kristiani yang berfungsi sebagai sarana komunikasi politik umat kristiani di Indonesia. Partai politik berbasis keagamaan kristen ini muncul sejak Pemilu pertama di Indonesia pada 1955 hingga pada masa reformasi pada pemilu 2004. Tujuan penelitian ini adalah menemukan peran Partai Damai Sejahtera sebagai sarana komunikasi politik umat kristiani pada masa reformasi periode 2004-2009. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspirasi yang diperjuangkan oleh Partai Damai Sejahtera pada masa reformasi tidak berbeda dengan aspirasi yang diperjuangkan oleh partai-partai politik umat kristiani pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, yaitu: *Pertama*, menjaga hak-hak minoritas. *Kedua*, menjaga pluralisme. *Ketiga*, menolak ide negara Islam dan syariat Islam.

Kata Kunci: Partai Politik Umat Kristiani, Komunikasi Politik, Partai Damai Sejahtera.

Abstract

This reserach examines the existance of Christians political parties as they are used as tools of political communication to Christians in Indonesia. Religion (Christian) based political party existed in Indonesia since 1955 election until the first Reformasi direct election in 2004. This research aims to find the answer how did the Partai Damai Sejahtera act as tool of Christians political communication in the reform era 2004-2009. The results show that christians voices which are struggled by PDS in the era of Reformasi are the same with the voices in the Old and New Order era. The voices are: first, defending the rights of minority groups in Indonesia. Second, defending pluralism. Third, rejecting the idea of establishing Islamic state and enforcing Islamic law in Indonesia.

Keywords: *Christians Political Party, Political Communication, Prosperous and Peace Party.*

Pendahuluan

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia tak lepas dari peran agama yang mampu memberikan spirit perlawanan terhadap

penjajah. Termasuk juga umat Kristiani (Protestan ataupun Katolik) memiliki andil dalam sejarah perjuangan bangsa. (Mengenai sejarah hubungan Gereja/ umat Kristiani dengan negara bisa di lihat dalam

studi McDonald, 1968: 219-266). Bersama kelompok mayoritas (Islam), umat Kristiani bahu-membahu turut berjuang melawan penjajah Belanda dan Jepang (Aritonang, 2007) Di awal-awal kemerdekaan, representasi umat Kristiani juga mendapat peran dalam pemerintah Sukarno-Hatta. Hubungan antar agama (terutama Islam-Kristen) sangat harmonis. Bahkan, sikap toleransi umat Islam pada awal-awal kemerdekaan ditunjukkan dengan keikhlasan membuang tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang akhirnya disepakati sebagai dasar negara (Maarif, 2006: 110) Lalu disepakatilah Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia.

Umat Kristiani juga bergiat di dalam partai-partai politik berbasis agama. Pada masa setelah kemerdekaan, mereka pernah mengenal Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik (Parkat). Kedua partai ini berdiri semenjak Maklumat Wakil Presiden Hatta pada bulan November 1945 (awal kemerdekaan). Partai-partai berbasis agama Kristen ini berhasil memproyeksikan tokoh-tokoh seperti Dr. J. Leimena, Melanchton Siregar, dr. Tambunan, Sabam Sirait, dan lain-lain ke pentas politik nasional. (www.leimena.org)

Pada fase-fase perubahan sosial politik di Indonesia, baik masa Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi 1998, peran umat Kristiani di pentas politik nasional tidak bisa dianggap remeh. Perubahan sosial politik pada 21 Mei 1998, gerakan reformasi membawa angin segar bagi kelompok politik sektarian (berbasis agama). Umat Kristiani pun tak ketinggalan turut mendirikan partai politik untuk berjuang dalam

panggung politik formal. Sepanjang 1999-2009 lahir belasan partai politik umat Kristiani.

Namun, dari sekian banyak partai politik Kristiani tersebut, mungkin hanya Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), Partai Kristen Nasional Indonesia (Krisna) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang mendapatkan suara cukup signifikan. Terlebih dari sekian banyak itu yang berhasil memperoleh kursi di parlemen hanyalah PDS. Banyaknya umat Kristiani yang berminat membentuk partai politik aliran ini dinilai cukup fenomenal. Sebab, pada masa Orde Baru kecenderungan ini sangat jarang terlihat, jika tidak dikatakan tidak terlihat sama sekali.

Kiprah umat Kristiani di panggung politik nasional menarik untuk dikaji. Minat umat Kristiani untuk membentuk partai politik tentu memiliki alasan-alasan tertentu pada setiap fase perubahan sosial politik nasional. Agenda-agenda politik dan program pun dijalankan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan oleh partai politik tersebut. Bagi umat Kristiani, keberadaan partai politik berbasis agama ini bisa menjadi sarana dan kendaraan untuk menyalurkan aspirasi yang terkait kehidupan mereka di Indonesia.

Sesuai dengan fungsinya, partai politik tentu saja didirikan berdasarkan beberapa hal penting bagi para pendiri maupun konstituennya. Kehadiran partai politik merupakan organisasi politik yang menjadi barometer demokrasi. Demokratis atau tidaknya sebuah sistem politik sangat bergantung pada kehadiran partai politik, terlepas dari berfungsi atau tidaknya partai politik tersebut. Jumlah partai politik banyak pun belum tentu menjamin terpeliharanya institusi dan nilai-nilai demokrasi. Meskipun jika jumlah partai

politik hanya satu (partai tunggal seperti di negara-negara komunis) tidak dapat pula disebut sebagai suatu sistem yang demokratis.

Demikian pula ketika fase perubahan sosial politik pada masa reformasi 1998. Masa reformasi dianggap sebuah fase dimana proses demokratisasi kembali dimulai di Indonesia. Membludaknya jumlah partai, termasuk partai umat Kristiani, merupakan salah satu pertanda proses demokratisasi itu berjalan. Dalam kaitan dengan proses demokratisasi itulah, penting kiranya menganalisis kiprah partai politik umat Kristiani di Indonesia.

PDS merupakan satu-satunya partai politik umat Kristiani yang berhasil membentuk satu fraksi dengan 13 kursi di parlemen (DPR RI) sejak masa reformasi 1998. Partai politik yang dibentuk pada 28 Oktober 2001 ini memperoleh 2.424.319 suara (2,14%) pada pemilu 2004. Sedangkan kursi yang diperoleh di parlemen sebanyak 13 kursi (2,36%). Dengan demikian, PDS tak bisa lolos *Electoral Threshold* (ET) yang ditetapkan sebesar 3%.

Oleh karena itu, untuk ikut Pemilu 2009 PDS harus berganti nama atau bergabung dengan partai politik lain. Beruntung, dalam Undang-Undang no. 10/2008 tentang Pemilihan Umum ada aturan peralihan bahwa semua partai peserta Pemilu 2004 berhak maju dalam Pemilu 2009. Pada Pemilu 2009, PDS tak mampu melampaui ketentuan *parliamentary threshold* (PT) 2,5%. Sayangnya, PDS yang memasang target 5%, hanya berhasil memperoleh 1.541.592 suara (1,48 %) (www.kpu.go.id). Ini berarti PDS tidak lolos PT. Dengan demikian, PDS tak berhak mendapatkan

kursi di DPR RI sebagaimana pada pemilu 2004. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan penelitian berikut ini:

Bagaimana peran Partai Damai Sejahtera sebagai sebuah sarana komunikasi politik umat Kristiani di parlemen politik nasional Indonesia Periode 2004-2009?

Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

Beberapa buku yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini dapat membantu dalam penulisan (penelitian) ini. Buku tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mianto Nugroho Agung dan Jeffrie AA. Lempas (Ed.), *Yesus dan Politik, Sebuah Bunga Rampai*, Komunitas Nisita, Jakarta, 2004; dan
2. Pdt. Dr. Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2004.

Buku *Yesus dan Politik, Sebuah Bunga Rampai* yang ditulis oleh para pakar dari beragam latar belakang pendidikan ini sebenarnya sedikit menyinggung keberadaan PDS. Disebutkan dalam tulisan itu bahwa kehadiran PDS menimbulkan pro dan kontra di kalangan Kristen. (Sinar Harapan, 29 Mei 2004) Konsekuensi dari perbedaan sikap tersebut, suara politik umat Kristen tidak utuh ke PDS. Alhasil, PDS tak berhasil dalam percaturan politik. Buku tersebut hanya mengulas mengenai sisi yang berbeda antara agama dan realitas masyarakat (politik). Karena itulah, keterlibatan kalangan Gereja dalam politik praktis sangat disesalkan.

Seakan ingin menegaskan keberadaan PDS di panggung politik nasional, Eka Darmaputera menilai bahwa tidak ada teologi yang apolitis. Ia menilai

bahwa sebuah teologi yang tidak menyerukan perubahan, secara tidak langsung dan mungkin tidak bermaksud begitu, berarti ingin melegitimasi dan ingin melestarikan *status quo*. Berteologi secara apolitis berarti berteologi dan berpolitik secara salah dan bodoh. Dengan demikian, bisa dikatakan, kehadiran PDS sesungguhnya merupakan kendaraan atau sarana bagi umat Kristiani untuk menjadi umat yang berteologi secara baik, yaitu yang berteologi secara politis.

Teori ini dipertegas oleh P.D. Latuihamallo bahwa membangun, memelihara, dan mengembangkan masyarakat, bahkan ikut menjaga perdamaian dunia, tidak mungkin terjadi tanpa politik. pada perspektif itulah pentingnya umat Kristiani untuk bersikap lebih politis. Namun, ia menegaskan bahwa sikap politis bukan hanya ditunjukkan dengan hanya sikap politik elitis berebut kekuasaan melalui partai politik. Akan tetapi harus ditunjukkan secara konkret dalam menjawab persoalan-persoalan masyarakat seperti perdamaian di Poso, Ambon, Papua dan bahkan Aceh.

Disimpulkan oleh Andreas A. Yewangoe, teori-teori yang ada dalam buku ini hanya menekankan pemisahan antara agama dengan negara. Menurutnya, kemungkinan besar munculnya isu ini karena ada wacana yang cukup kuat di Indonesia untuk menerapkan syariat Islam, sebagaimana dijanjikan oleh beberapa partai politik dalam transaksi menjelang pemilu calon presiden 2004. Menurut Yewangoe, buku ini seharusnya terus terang berbicara soal ini, agar pembaca yang mayoritas umat Kristiani lebih jelas memiliki argumen tertentu tentang syariat Islam ini.

Sedangkan buku kedua berjudul *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, merupakan buku sejarah yang banyak memberikan perspektif partai-partai politik umat Kristiani di Indonesia. Sayangnya buku ini sama sekali tidak menyinggung PDS. Namun, paling tidak, buku ini adalah buku yang bisa memberikan benang merah penting keberadaan dan peran partai-partai politik umat Kristiani di Indonesia.

Secara umum, buku ini memberikan pembahasan historis yang komprehensif dan mendalam tentang "perjumpaan" (*encounter*) di antara kedua agama Ibrahim (*Abrahamic religions*) di Indonesia yang jauh dari tempat kelahiran mereka pertama di kawasan yang kini dikenal sebagai Timur Tengah. Menurut rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, perjumpaan yang terlukis dalam buku ini yang sering menampilkan "pergumulan" (*struggle*) memang lebih banyak terkait dengan politik dan kekuasaan. Karena model penulisan sejarah dalam buku ini memakai model penulisan "sejarah konvensional" berdasarkan ilmu sejarah, Azra menilai bahwa potret dan citra yang muncul tentang hubungan Kristen dan Islam di Indonesia sejak masa awal kedatangan keduanya sampai masa-masa terakhir ini penuh dengan pergumulan, persaingan, konflik, dan bahkan kekerasan komunal (Aritonang: 2004)

Teori penting yang diungkapkan dalam buku ini adalah ditemukannya awal keterlibatan kalangan gereja dengan jalur politik formal (partai politik) di Indonesia. Teori ini mengungkapkan bahwa keterlibatan kalangan gereja dimulai ketika Dewan Gereja Indonesia (DGI) mendukung Partai Kristen Indonesia

(Parkindo) pada pemilu 1955. Secara jelas teori ini mengungkapkan bahwa agenda penting DGI mendukung Parkindo adalah *pertama*, mempertanyakan dan sikap keberatan DGI atas keberadaan Kementerian Agama dan pengadaannya oleh pemerintah Indonesia. DGI khawatir bahwa pengadaan Kementerian Agama akan menggiring Republik Indonesia ke arah negara Islam; dan *kedua*, isu negara Islam yang berkaitan dengan masalah dasar negara. Dalam isu kedua ini, DGI meminta Parkindo untuk senantiasa menjaga kehidupan kemajemukan (*pluralisme*) dan menghindari dasar negara agama tertentu (terutama Islam).

Dalam sistem politik yang demokratis, partai politik (*parpol*) berfungsi sebagai sarana komunikasi politik. *Parpol* dianggap sebagai nyawa dari sistem demokrasi. Sistem politik yang sehat membutuhkan komunikasi yang baik yang dilakukan oleh *parpol-parpolnya*. Secara sederhana, komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan atau informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat, dan dari masyarakat kepada pemerintah. (Pye, 1963)

Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik yaitu:

- a. sebagai proses *interest aggregation* atau penggabungan kepentingan; penyalur aneka pendapat dan aspirasi masyarakat yang beragam kemudian mengaturnya sedemikian rupa serta menampung dan menggabungkan pendapat dan aspirasi tersebut. Tuntutan dan aspirasi kepentingan masyarakat nantinya disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik

agar bisa dijadikan sebuah kebijakan publik (*public policy*).

- b. sebagai sarana untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana dan kebijakan pemerintah (*political socialization*).
- c. sebagai penghubung dan penerjemah antara pemerintah dan warga negara. Kebijakan negara yang biasanya rumit dengan istilah-istilah teknis politik akan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat luas.

Partai politik umat Kristiani adalah partai politik yang berbasis pada keagamaan (dalam hal ini agama Kristen) dan memperjuangkan aspirasi umat Kristiani dan. Di Indonesia dan beberapa negara lain, penyebutan kata "Kristen" selalu diasosiasikan dengan Protestanisme. Untuk memudahkan penyebutan dan menghindari kerancuan, dalam penelitian ini penyebutan "Kristen" berarti merujuk pada agama Kristen (baik Protestanisme maupun Katolik).

Demikian pula dengan penyebutan umat Kristiani. Istilah "umat Kristiani" dalam penelitian ini berarti merujuk pada umat Protestan maupun umat Katolik. Jadi, partai politik umat Kristiani adalah partai politik yang memperjuangkan aspirasi umat Kristiani (baik umat Protestan ataupun umat Katolik) dan berbasiskan pada agama Kristen (baik berbasiskan Protestanisme atau Katolik atau juga kedua-duanya).

Teori yang P.D. Latuihamallo mengenai pentingnya umat berpolitik dalam rangka menjaga perdamaian akan penulis gunakan untuk menganalisa kemunculan dan perjuangan yang

dijalankan PDS. Adanya konflik komunal bernuansa etnik dan agama tertentu di Ambon dan Poso menjadi perhatian dan menarik untuk dikaji, sejauh mana konflik tersebut memberikan pengaruh dan desakan kepada umat Kristiani untuk mendirikan partai politik umat Kristiani.

Untuk mendapatkan analisa yang utuh mengenai agenda yang diusung oleh PDS, penulis akan menggunakan pula teori yang dikembangkan oleh Jan S. Aritonang tentang aspirasi kalangan Gereja di politik formal Indonesia, terutama aspirasi kepada Partai Kristen Indonesia (Parkindo) terhadap hal-hal yang berbau negara Islam dan syariat Islam. Meskipun penelitian yang dilakukan Aritonang ini merujuk pada partai politik umat Kristiani Parkindo, penulis menilai masih ada relevansi teori ini jika digunakan untuk menganalisa PDS.

Selain teori yang dikembangkan oleh Aritonang, penulis pun akan mencoba menganalisa fakta-fakta lainnya yang berhubungan dengan wacana penerapan syariat Islam di Indonesia. Sebagaimana kritik Andreas A. Yewangoe terhadap buku *Yesus dan Politik, Sebuah Bunga Rampai* yang kurang mengelaborasi argumen atau sikap PDS dan umat Kristiani terhadap wacana syariat Islam tersebut, maka penelitian ini akan diarahkan untuk menganalisa dan mengisi kekosongan teori tersebut.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. sedangkan, metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian kepustakaan (*research library*)

atau studi kepustakaan dengan data-data lainnya yang berasal dari buku-buku, media massa dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Partai-Partai Politik Umat Kristiani dari Orde Lama ke Orde Baru

Pemilu pertama Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955, saat Republik Indonesia masih berusia 10 tahun. RI sejak diproklamkan 17 Agustus 1945, telah memilih menjadi sebuah negara hukum yang menganut demokrasi. Sebenarnya, sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta, pemerintah Indonesia sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal 1946. Keinginan itu termuat dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 November 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Namun, keinginan itu tidak dapat terwujud karena kendala yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. (www.beritaindonesia.co.id)

Sejak adanya Maklumat itu, perjuangan umat Kristiani di pentas politik Indonesia dimulai. ketika Belanda menyerahkan kedaulatannya kepada pemerintah RI pada 27 Desember 1949, Indonesia masih berbentuk negara serikat (RIS). Pada masa peralihan yang singkat dari RIS kembali ke NKRI itu, yaitu hingga 17 Agustus 1950, pemerintah RIS dipimpin oleh Hatta yang dikenal sebagai

tokoh nasionalis dan tidak mewakili partai politik. Kabinet tersebut terdiri dari dua kelompok, Republik (11 orang) dan Federal (5 orang). Kelompok Republik diwakili oleh 4 orang dari Masyumi (Sjafrudin Prawiranegara, Abu Hanifah, Wahid Hasjim, dan Mohammad Roem), 3 orang dari Partai Nasionalis Indonesia (Wilopo, Herling Laoh, dan Arnold Mononutu, dua yang terakhir beragama Kristen), 1 orang dari Parkindo (Johannes Leimena), dan 1 orang dari Partai Indonesia Raya (Supomo); sisanya tidak mewakili partai politik. (Aritonang, 2004)

Setelah UUD RIS digantikan oleh UUD 1950, perjuangan partai politik umat Kristiani selalu mendapatkan tempat di kabinet demokrasi liberal Indonesia. Pada masa ini terjadi banyak sekali pergantian kabinet dan Perdana Menteri. Namun demikian, Parkindo dan Partai Katolik hampir selalu mendapatkan tempat di setiap pergantian kabinet. Menurut Alfian, UUD 1950 yang mencerminkan demokrasi liberal seperti yang terdapat di beberapa negara Barat memberikan peranan yang sangat penting kepada Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (Parlemen) karena ia menentukan nasib Pemerintah atau Eksekutif yang berkuasa, yang menentukan hidup matinya kabinet. (Alfian, 1992:31)

Menurut (Aritonang, 2004), setelah berada di kabinet Hatta, Parkindo dan Partai Katolik juga mendapatkan tempat di kabinet Perdana Menteri Mohammad Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951). Kabinet ini terdiri dari 18 orang. Duduk empat perwakilan dari Masyumi (termasuk Natsir) dan dua wakil PSII, di samping beberapa wakil dari partai lain. Di dalamnya juga terdapat wakil dari partai-partai umat Kristiani,

yaitu FS Harjadi (Partai Katolik) dan Johannes Leimena (Parkindo). Komposisi kabinet seperti itu, yang di dalamnya terdapat juga beberapa orang yang tidak mewakili partai, membuat pengamat tertentu menilainya sebagai *zaken kabinet*, kabinet yang terutama didasarkan pada kecakapan dan ketokohan anggotanya, bukan pada afiliasi partainya ataupun agamanya.

Tradisi partai umat Kristiani berada dalam kabinet pun berlanjut pada kabinet Sukiman (26 April 1951-23 Februari 1952). Kabinet ini terutama merupakan koalisi antara Masyumi dan PNI. Perdana Menteri masih tetap dari masyumi, tetapi bukan lagi Natsir, melainkan Sukiman Wirjosandjojo. Kedua partai itu masing-masing memperoleh lima kursi, lalu diberikan beberapa kursi kepada partai-partai lain (termasuk Parkindo dan Partai Katolik masing-masing satu). Demikian pula halnya dalam Kabinet Wilopo (1 April 1952-3 Juni 1953). Wilopo adalah wakil dari PNI dipercaya menjadi Perdana Menteri setelah Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) dan Siddik Djojokusanto (PNI) gagal membentuk kabinet. Di dalam kabinet ini PNI dan Masyumi masing-masing memperoleh empat kursi. Sedangkan, Parkindo dan Partai Katolik, seperti pada dua kabinet sebelumnya, tetap mendapat masing-masing satu kursi.

Namun keadaan di atas berbeda ketika kabinet dipimpin oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953-23 Juli 1955). Di dalam kabinet ini tidak terdapat wakil dari Parkindo maupun Partai Katolik. Walaupun demikian, duduk seorang Kristiani, yaitu Dr. Ferdinand L. Tobing mewakili Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI). Deliar Noer mencatat

bahwa Ferdinand Tobing adalah seorang penganut protestan yang taat, walaupun ia juga menilai bahwa SKI adalah “partai gurem yang tidak berarti buat masyarakat”. Absennya kehadiran partai umat Kristiani di kabinet juga berlanjut ketika kabinet berganti di bawah pimpinan Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956). kabinet yang berumur pendek ini diberi mandat untuk menyelenggarakan pemilu pertama pada 1955. Barulah pada kabinet hasil pemilu 1955 di bawah pimpinan Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956-14 Maret 1957), Parkindo dan Partai Katolik mendapatkan kursi kembali walaupun masing-masing hanya mendapatkan 1 kursi.¹

Masa pemilu 1955 adalah momentum kalangan Gereja untuk menjalin hubungan dengan politik formal Indonesia. Pada masa ini kalangan Gereja sangat dekat khususnya dengan Parkindo. Kalangan Gereja yang diwakili oleh Dewan Gereja-gereja Indonesia (DGI) secara terbuka mendukung Parkindo pada kampanye pemilu 1955. Hubungan ini makin tampak ketika DGI dan Parkindo berhadapan dengan sejumlah peristiwa politik, yang sedikit banyak berkait juga dengan hubungan antara Kristen dan Islam di negeri ini.

Ada beberapa masalah krusial yang menjadi aspirasi DGI kepada Parkindo, yakni: *pertama*, pengadaan atau keberadaan Kementerian Agama. Sejak pembentukan DGI, masalah ini selalu dibicarakan. Sebagian anggota DGI

khawatir bahwa pengadaan Kementerian Agama akan menggiring RI ke arah negara Islam. *Kedua*, isu negara Islam yang berkaitan dengan masalah dasar negara. Isu ini dibicarakan pada sidang Lengkap II DGI (20-30 Juni 1953) dan sidang Lengkap III (8-17 Juli 1956), yang pada intinya mereka mengkhawatirkan akan bangkitnya kembali gerakan Islam yang menginginkan pendirian negara Islam.

Setelah DGI secara formal mendukung Parkindo pada pemilu 1955, maka beberapa agenda kalangan Gereja menjadi aspirasi utama dan menjadi agenda utama pula Parkindo. Khusus berhubungan dengan aspirasi adanya kekhawatiran dari kalangan Gereja terhadap kemungkinan berdirinya negara Islam dan syariat Islam, Parkindo membawanya hingga sidang Dewan Konstituante. Bersama PNI, PKI, Murba, dan Partai Katolik, Parkindo memperjuangkan dasar negara Pancasila dan menolak dengan tegas gagasan dasar negara Islam dari pihak Masyumi dan NU. (www.majalah.tempointeraktif.com)

Masa pasca Orde Lama adalah masa-masa sulit bagi partai umat Kristiani. Dalam perjalanannya berarti Parkindo dan Partai Katolik hanya ikut 2 kali pemilu yaitu pada 1955 dan 1971. Pada pemilu 1971 (di masa Orde Baru), suara Parkindo masih berada pada urutan keenam, sedangkan Partai Katolik berada di urutan ketujuh dari semua suara sah. (www.thejakartapost.com)² Karena ada kebijakan fusi partai dari pemerintah

¹ Parkindo mendapatkan 1.003.326 suara atau 2,66% dari jumlah suara sah, dan menempatkan 8 wakil di parlemen. Sedangkan Partai Katolik mendapatkan 770.740 suara atau 2,04% dari jumlah suara sah, dan menempatkan 6 wakil di parlemen.

² Parkindo mendapatkan 733.359 suara atau 1,34% dari jumlah suara sah, dan menempatkan 7 wakil di parlemen. Sedangkan Partai Katolik mendapatkan 603.740 suara atau 1,10% dari jumlah suara sah, dan menempatkan 3 wakil di parlemen.

Suharto, Parkindo dan Partai Katolik berfusi bersama partai-partai lainnya menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). (Suara Pembaruan, 30 Maret 2010)³ Praktis sebagian suara partai umat Kristiani berpindah ke PDI dan sebagian lain berpindah ke Golkar atas tekanan-tekanan dari Orde Baru.

Barulah ketika Orde Baru berakhir pada 1998, partai umat Kristiani bermunculan kembali. Menjelang pemilu kedua pada masa reformasi yakni pemilu 2004, muncul PDS sebagai partai umat Kristiani yang siap berkompetisi dengan partai-partai politik lainnya.

Sejarah Kemunculan Partai Damai Sejahtera

Partai Damai Sejahtera (PDS) adalah partai politik umat Kristiani yang unik. Partai ini unik karena partai ini satu-satunya partai yang menyatakan diri sebagai representasi partai politik umat Kristiani (dalam artian Protestanisme dan Katolik). (The Jakarta Post, 26 Januari 2004)

Bukan hanya itu, bahkan partai ini menyatakan keterbukaannya kepada pemilih Muslim dan non-Kristiani untuk menjadikan partai ini pilihannya. Jika

³ tanggal 9 Maret tahun 1970, lima parpol yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Murba membentuk kelompok demokrasi Indonesia. Setelah beberapa kali pertemuan kelompok itu menamakan partai barunya menawarkan tiga nama yakni "Partai Demokrasi Pancasila", "Partai Demokrasi Pembangunan" dan kemudian baru menetapkan nama yang sah "Partai Demokrasi Indonesia". Partai baru itu dideklarasikan tanggal 10 Januari 1973 oleh tokoh-tokoh nasional antara lain Moh Isnaeni dan Abdul Majid (PNI), Ben Mang Reng Say dan FX Sumarsono (Partai Katolik), Sabam Sirait dan A Wenas (Parkindo), A Sukarmadidjaja (IPKI), S Murbantoko dari Murba.

membandingkan dengan partai politik umat Kristiani besar yang pernah ada seperti Parkindo yang hanya menyatakan diri sebagai partai umat Protestan dan Partai Katolik sebagai partai umat Katolik, jelas PDS merupakan fenomena baru dalam khazanah politik umat Kristiani.

Dalam Akte Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Elisa Asmawel, SH dengan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 2001, PDS didirikan oleh 50 orang lebih. PDS kemudian dideklarasikan dihadapan publik di Jakarta pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2001 dan di hadapan berbagai media. Hari Minggu 28 Oktober 2001 tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia yaitu berdirinya sebuah partai baru di dalam dinamika umat Kristiani serta konstelasi politik bangsa Indonesia. Partai ini dibentuk untuk berjuang menjadi Organisasi Peserta Pemilu, dan perjuangan berikutnya menghantar kadernya untuk dicalonkan sebagai Presiden, Wakil Presiden, dan calon-calon legislatif. (www.partaidamaisejahtera.com)

PDS lahir sebagai Partai umat Kristiani berwawasan Nasional yang berazaskan Pancasila & UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semangat Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu). PDS tampil di pemilu 2004 bersama partai politik umat Kristiani lainnya yakni Partai Damai kasih Bangsa (PDKB), Partai Demokrasi Kasih Bangsa Indonesia (PDKBI), Partai Katolik Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai katolik (Parkat) versi baru, Partai Kristen Nasional Demokrasi (PKND), dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) versi baru.

PDS dipimpin oleh dr. Ruyandi Hutasoit, anak seorang pimpinan Parkindo pada masa Orde Lama. Hutasoit sendiri

adalah presiden yayasan Doulus, sebuah yayasan sosial terkemuka di kalangan umat Kristiani.

Partai Damai Sejahtera didirikan setelah melalui serangkaian perenungan dan penelaahan atas berbagai peristiwa dan tragedi yang mengancam eksistensi manusia seperti peristiwa kerusuhan, pengrusakan, pembakaran gedung dan tempat ibadah, serta berbagai pelanggaran HAM, dimana umat Kristiani menjadi sasaran orang yang tidak bertanggungjawab dan tidak bermoral. Kejadian ini menimbulkan keprihatinan dari siapapun. Keprihatinan inilah yang mengawali kegalauan sekaligus kepedulian oleh sekelompok anak muda yang tergabung dalam JALA (Jaringan Pelayanan) Alumni Universitas Sam Ratulangi di Jakarta dan JYF (*Jakarta Youth Fellowship*) juga di Jakarta yang biasa mengadakan persekutuan dan memiliki jadwal doa dan puasa setiap hari Rabu dan kemudian didukung oleh beberapa Wartawan Tabloid Jemaat Indonesia.

Saat berbuka puasa mereka mendiskusikan berbagai hal tentang kondisi bangsa ini, mulai dari ekonomi, hukum, politik, agama, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Mereka mendapati realita bahwa wakil-wakil rakyat di badan legislatif bukan hanya tidak mampu mengekspresikan aspirasi rakyat yang diwakilinya, tetapi justru larut dalam konfigurasi politik yang terkesan tidak membela kepentingan-kepentingan kelompok yang lemah dan tertindas. Berangkat dari keprihatinan di atas, PDS akhirnya didirikan. Secara sederhana, bisa dipahami bahwa pendirian PDS merupakan solusi yang dari masalah yang dihadapi umat Kristiani pada saat itu,

yakni banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi pada umat Kristiani.

Selain itu, Hidayat menilai bahwa kemunculan partai-partai umat Kristiani di awal reformasi sebagai bukti adanya ketidakpercayaan dan kecurigaan umat Kristiani terhadap umat Muslim. Perasaan saling curiga antara umat Kristiani dan Muslim ini disebabkan oleh pemerintah Orde Baru yang melarang adanya diskusi dan wacana publik mengenai perbedaan-perbedaan, termasuk masalah keagamaan. Kecurigaan umat Kristiani memuncak pada pertengahan 1990-an, ketika presiden Suharto mencari dukungan politik dengan mulai mengakomodasi aspirasi-aspirasi kelompok Islam. Dari situlah kemudian berkembang kecurigaan umat Kristiani kepada umat Muslim karena khawatir akan adanya penegakan syariat Islam di Indonesia. Kekhawatiran itu bertambah ketika pada tahun-tahun terakhir Suharto menjabat presiden, terjadi pembakaran gereja-gereja di berbagai tempat. serangkaian kejadian inilah yang menjadikan umat Kristiani tidak percaya lagi pada partai-partai yang ada (PDI dan Golkar) dan mendirikan partai umat Kristiani di awal reformasi.

Komunikasi Politik PDS di Parlemen Nasional (DPR-RI)

Sebagaimana Parkindo yang memperjuangkan aspirasi kekhawatiran kalangan Gereja terhadap isu-isu berbau negara Islam dan syariat Islam, maka apa yang diperjuangkan oleh PDS pun tidak jauh berbeda dengan yang ditunjukkan oleh Parkindo. Hal ini sesuai dengan teori yang dikembangkan Aritonang yang menjelaskan betapa Parkindo dijadikan sarana politik yang penting bagi kalangan Gereja (DGI). (Aritonang, 2004:289-290)

Begitu pula yang terjadi dengan PDS. Dalam menjalankan perannya di dalam politik formal Indonesia (parlemen), PDS adalah partai politik umat Kristiani yang sangat didukung oleh kekuatan kalangan Gereja seperti Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Indonesia (KWI), selain kalangan aktivis Kristen dari elemen mahasiswa dan akademisi. (The Jakarta Post, 26 Januari 2004) Sejalan dengan agenda Parkindo pada masa Orde Lama, agenda PDS yang utama adalah terdiri dari tiga hal: *pertama*, menjaga hak-hak minoritas; *kedua*, menjaga pluralisme; dan *ketiga*, menolak ide negara Islam dan syariat Islam. (Lihat Gambar 1)

Peran PDS di parlemen (2004-2009) memang cukup besar. Namun perannya yang paling menonjol adalah ketika PDS menolak berbagai isu penting di senayan yang dinilai diskriminatif, merugikan kalangan minoritas, tidak menghormati adanya pluralitas (kebhinnekaan), dan kebangsaan. Di antaranya adalah penolakan PDS terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perbankan Syariah, RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), RUU Pornografi, RUU Pengelolaan Zakat, dan RUU jaminan produk halal.

Fraksi PDS DPR RI menyatakan penolakannya terhadap RUU tentang Perbankan Syariah dan RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Surat penolakan bernomor A.749/F.PDS/ DPR-RI/II/ 2008 ditujukan untuk Ketua DPR RI Agung Laksono. Surat penolakan ditandatangani Ketua Fraksi PDS Pastor Saut M Hasibuan dan Sekretaris Carol Daniel Kadang (www.kompas.com). Sejumlah alasan dikemukakan dibalik penolakan itu di antaranya RUU tersebut

bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 dan mengancam NKRI. Bahkan, anggota Komisi XI dari Fraksi PDS Retna Rosmanita Situmorang mengatakan fraksinya menolak seluruh draf daftar inventaris masalah (DIM) kedua RUU tersebut. Penolakan dilakukan setelah fraksinya melakukan serangkaian dialog dan pembahasan dengan berbagai *stakeholder* seluruh Indonesia dan beberapa inti RUU tersebut yang tidak sesuai konsep NKRI yang berdasarkan Pancasila.

Selain itu, Fraksi PDS menolak pengesahan RUU Pornografi. Bagi PDS, isi RUU anti pornografi dinilai sangat diskriminatif dan tidak menghormati pluralisme bangsa. (The Jakarta Post, 25 Maret 2009) Penolakan RUU anti pornografi inipun didukung oleh Persatuan Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Indonesia (KWI). Menurut PGI, RUU anti pornografi ini tidak menghormati ekspresi budaya bangsa yang beragam. Sejalan dengan itu, KWI menilai bahwa kontroversi RUU ini mengarah pada perbedaan ideologi dan politik yang tajam, dan dikhawatirkan akan memicu terjadinya konflik komunal. (the Jakarta Post, 4 November 2008)

Tak hanya itu, Fraksi PDS juga menolak RUU Pengelolaan Zakat dan RUU jaminan Produk Halal. Alasannya, dua RUU Syariah tersebut dinilai berpotensi memicu polemik. (Seputar Indonesia, 20 Februari 2009) Bahkan, Fraksi PDS menegaskan, jika pemerintah tetap memaksakan syariah maka Indonesia berada dalam keadaan terancam. RUU Pengelolaan Zakat dan RUU Jaminan Produk Halal juga merupakan suatu bentuk RUU diskriminatif sama halnya dengan UU Pornografi. Apa yang

dianggap haram oleh sebagian orang belum tentu haram bagi sebagian orang lainnya.

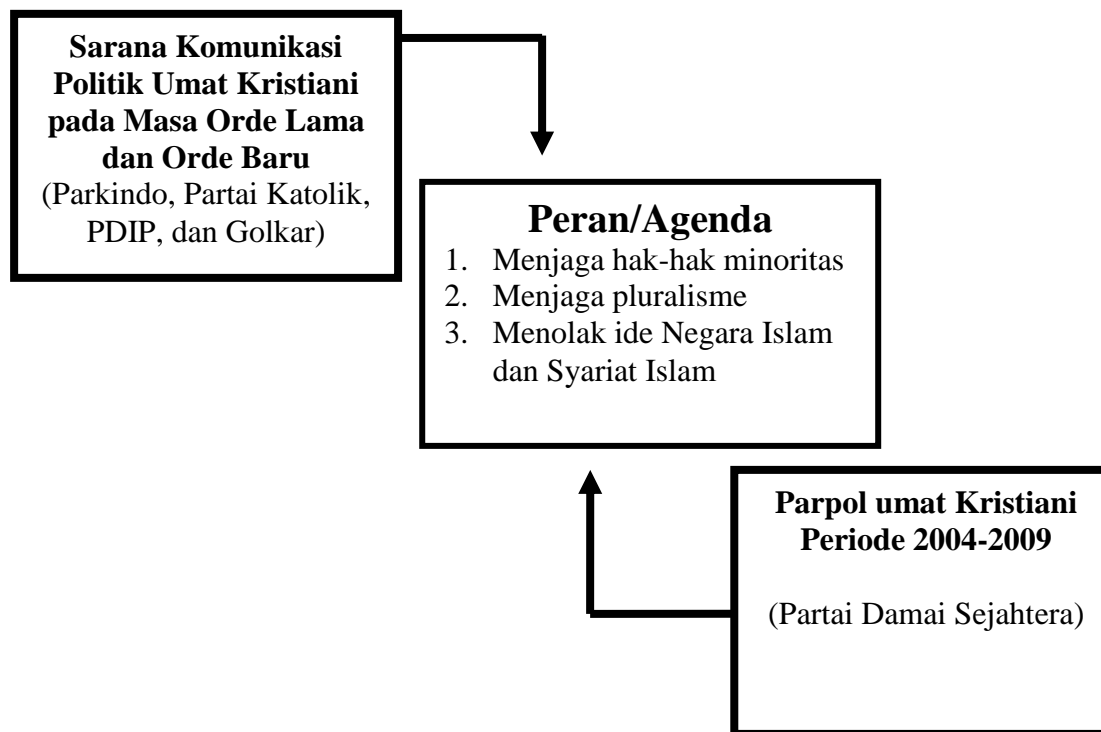
Permasalahan yang muncul dengan adanya RUU Pengelolaan Zakat tersebut adalah bahwa zakat memiliki dasar hukum berdasarkan Alquran yang merupakan aturan agama Islam, hal ini bertentangan dengan sifat UU yang mana setiap UU yang ditetapkan di negara Indonesia harus berlaku untuk setiap orang dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Jika suatu aturan agama tertentu menjadi acuan bagi suatu UU maka dikemudian hari bukan tidak mungkin ada agama atau kelompok lain yang mengajukan UU yang berdasarkan keyakinan mereka, yang mana ini justru akan menunjukkan ketidakpastian hukum di negara Indonesia kelak.

Permasalahan lainnya adalah bahwa zakat menjadi bagian dalam penanggulangan kemiskinan namun hanya untuk kelompok agama tertentu yang meyakini agama tersebut. Jika RUU Pengelolaan Zakat ini disahkan maka akan ada perbedaan dalam masyarakat karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai agama. Bagi umat Muslim ketika mereka membayar zakat maka akan mengurangi pajak penghasilan yang harus dibayarkan, sedangkan bagi yang tidak membayar pajak maka besarnya pajak penghasilan tetap dan tidak ada pengurangan, hal ini akan memicu kecemburuan dalam masyarakat. (www.Christianpost.co.id)

Berkaitan dengan RUU jaminan produk halal, PDS berkeberatan karena isi RUU ini akan menyulitkan dan bisa menimbulkan kekerasan di masyarakat. Dalam pasal 31 RUU tersebut disebutkan bahwa masyarakat diberikan keleluasaan

untuk membantu mengawasi penerapan undang-undang ini di lapangan. Pasal inilah salah satu yang menjadi keberatan PDS, karena dinilai akan memicu tindakan-tindakan kekerasan kepada para penjual makanan yang tidak mencantumkan label halal. RUU ini dinilai akan memberikan implikasi negatif di lapangan, karena realita di masyarakat dan kultur tertentu makanan yang haram bagi Muslim seperti daging babi dan anjing dijual bebas. (The Jakarta Post, 17 Februari 2009).

Gambar 1
Komunikasi Politik Umat Kristiani di Parlemen Indonesia



Kesimpulan

Gerakan partai-partai politik umat Kristiani di Indonesia memang memberikan warna tersendiri. Dalam sejarah bangsa Indonesia, kalangan umat Kristiani dan khususnya partai politik umat Kristiani telah memberikan kontribusi berharga bagi kemerdekaan maupun masa setelah kemerdekaan. Agenda-agenda partai politik umat Kristiani yang pernah tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia seperti Parkindo dan PDS terlihat sangat khas karena berusaha menjadi *watchdog* bagi kaum mayoritas bahwa NKRI dan pluralisme bangsa adalah harga mahal yang harus dipertahankan.

Dalam konteks demokrasi, peran PDS bisa jadi merupakan *checks and balances* atas agenda-agenda politik kelompok mayoritas. Dengan keberadaannya, bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga dari penyalahgunaan kekuasaan yang biasa disebut sebagai “kedikatoran mayoritas dan tirani minoritas”.

Daftar Pustaka

Buku

- Agung, Mianto Nugroho dan Jeffrie AA. Lempas (Ed.). (2004) *Yesus dan Politik, Sebuah Bunga Rampai*, Komunitas Nisita, Jakarta:.
- Alfian. (1992). *Pemikiran dan perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Aritonang, Pdt & Jan S. (2004). *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, BPK. Jakarta: Gunung Mulia.

_____, (2007).
“Dinamika Perkembangan

Kristen (protestan) di Indonesia dalam Konteks Pluralitas Masyarakat Indonesia, tantangan dan peluang ditinjau dari perspektif historis”, makalah dalam acara diskusi *Studi Agama-agama –Belajar Bersama Kelompok Antar-Iman*, di Manado.

- Maarif, Ahmad Syafii. (2006). *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara; Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*”, Jakarta: LP3ES.
- McDonald, Lee Cameron, *Western. (1968). Political Theory, Part 2*, New York: Harcourt Jovanovich.
- Pye, Lucyan W. (1963). *Communication and Political Development*, Princenton NJ: Princenton University Press.

Internet

- Alaman, Ansel, ”Kongres III PDIP, Regenerasi yang Mandek”, *Harian Suara Pembaruan*, 30 Maret 2010
- Hidayat, Rais, “Christian Party Offer Hope to Minority Voters”, *The Jakarta Post*, 26 Januari 2004
- “Christian PDS Party Fights to strengthen country’s pluralism”, *the Jakarta Post*, 25 Maret 2009
- “Commentary: anti-pornography bill could deepen religious divide”, *the Jakarta Post*, 4 November 2008
- “Halal product bill harmful to people, says PDS lawmakers”, *the Jakarta Post*, 17 Februari 2009
- “Keterlibatan Umat Pada Persoalan Sosial”, *Harian Umum Sinar Harapan*, Sabtu, 29 Mei 2004
- “Panas di Sidang Akrab di Luar”, diakses dari <http://majalah.tempointeraktif.com/id/cetak/2007/08/13/ LU/mbm.20070813.LU124715.id>.

html, pada 17 November 2009

“Pemilu 2009 yang Memerdekakan”
diakses dari Sumber:

[www.beritaindonesia.co.id/
beritautama/pemilu2009yangmemerdekakan/page4/+hasil+parkindo+pemilu+1955&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id](http://www.beritaindonesia.co.id/beritautama/pemilu2009yangmemerdekakan/page4/+hasil+parkindo+pemilu+1955&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id), pada 5 April 2010, pkl. 20.30 Wib.

“Peran Serta Umat Kristen Dalam Membangun Indonesia Baru,”
Sumber:<http://www.leimena.org/jt20030913.html>

”Umat”, *Kompas.com* 14/3/2008, diakses pada 5 April 2010, pkl. 14:10 WIB
www.christianpost.co.id/dbase.php ...
www.kpu.go.id/www.partaidamaisejahtera.com, *Harian Seputar Indonesia* 20 Februari 2009.